

# Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika

Universitas Terbuka  
2021



## Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Indonesia

### Ideologi

Pancasila sebagai Ideologi merupakan segala cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif

### Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Kaelan, 2010 :40-41) memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Filsafat



Cita-cita



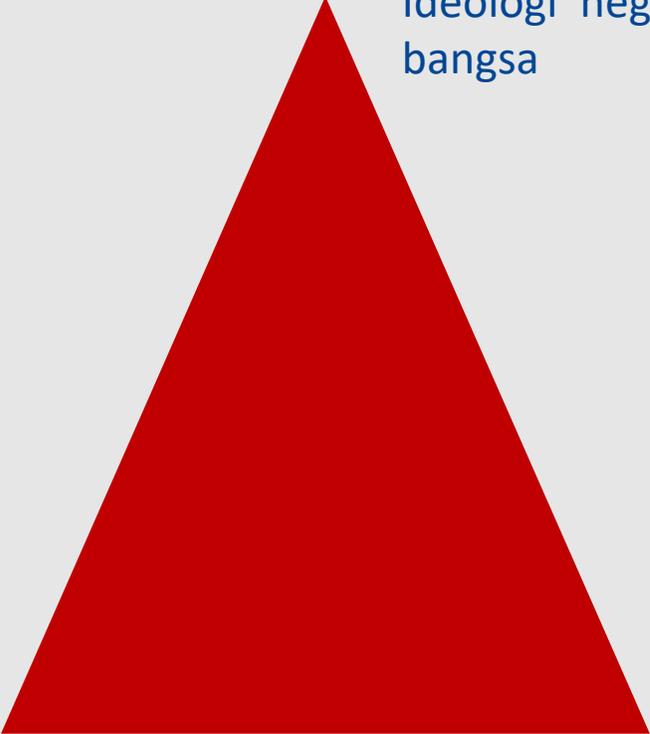
Ideologi



Ideologi merupakan cita-cita yang dijalankan oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu

Besaran ideologi berpengaruh pada kehidupan social ditentukan oleh seberapa dalam penetrasi ideologi tersebut, yang bisa dilihat dari tingkat keyakinan dan pengetahuan dari pengikutnya (orang-orang) atas berbagai dimensi ideologi tersebut serta seberapa persisten dan konsisten mereka dalam mengamalkannya. Oleh karena itu, ideologi harus mengupayakan kerangka keyakinan (mitos), pengetahuan (logos), dan Tindakan (etos)

## Makna Ideologi Bagi Negara



Ideologi negara sebagai tujuan atau cita-cita suatu bangsa

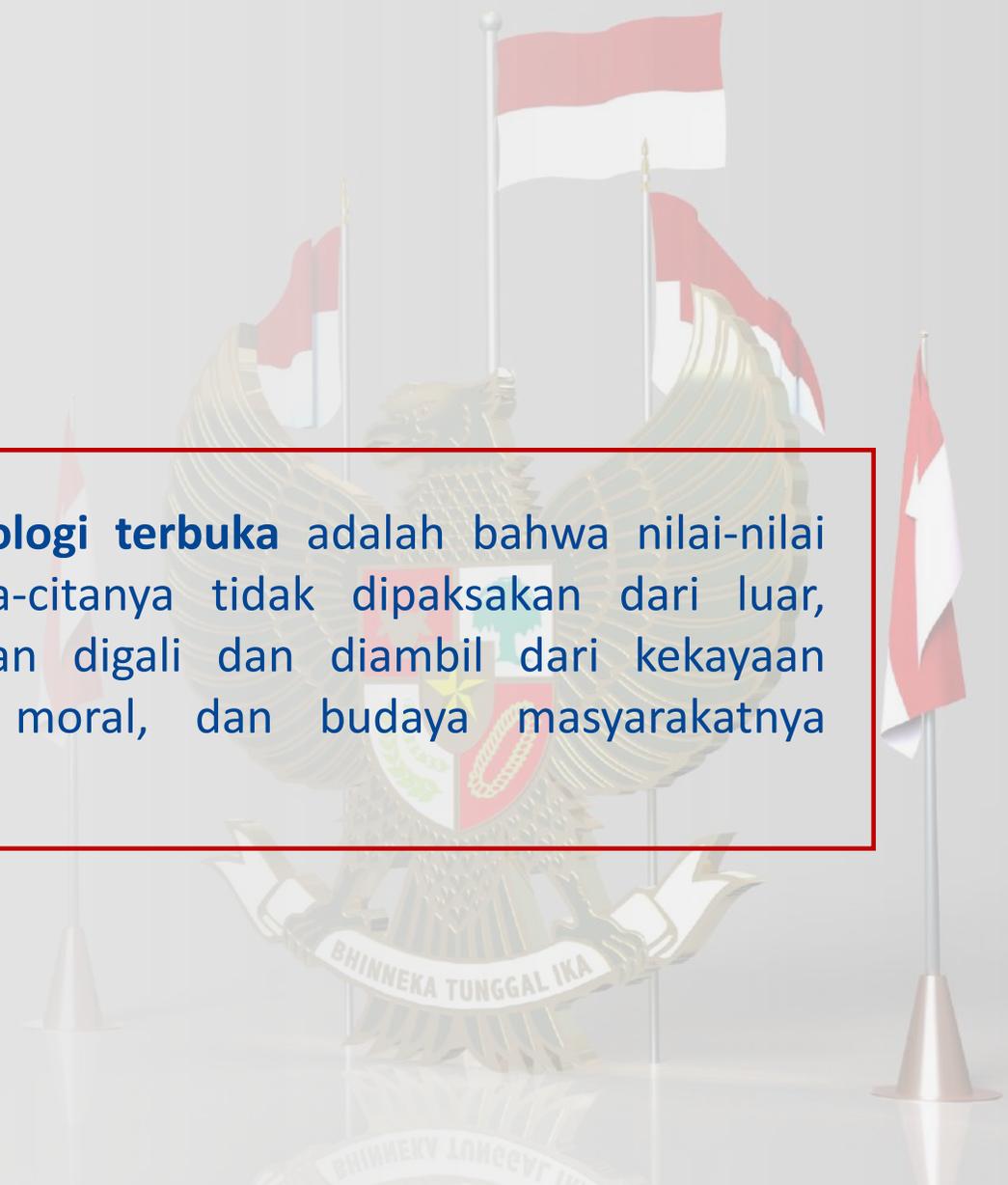


Menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat bagi bangsa yang bersangkutan serta menjadi pandangan kedepan bagi suatu negara.

## Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

**Ideologi terbuka** adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.

**Ciri ideologi terbuka** adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri



## Faktor Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

- Pancasila dikonstruksikan sebagai dasar filsafat (Philosophische Grondslag) negara
- Pancasila dirumuskan melalui proses overlapping consensus (consensus secara tumpang tindih) dengan mencari buah sitiesis atau titik temu dari keragaman aspirasi ideologis, keagamaan, adat, dan golongan, yang relative terwakili dalam korpus pembentuk dasar negara dan Konstitusi Proklamasi
- Pancasila sebagai civil religion tidak dikembangkan secara vertika dengan dimonopoli oleh negara, melainkan dikembangkan dengan melibatkan peran komunitas.
- Pancasila sebagai ideologi consensus di ranah public kenegaraan itu karena adanya elemen-elemen konvergensi di balik segala perbedaan yang ada
- Pancasila merupakan overlapping consensus, hanya beroperasi di ruang public-kenegaraan



## Pancasila Sebagai Dasar Negara

(Kaelan, 2010 :40-41)

Memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.



# Dasar Negara Republik Indonesia dirumuskan saat sidang BPUPKI

## PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM NEGARA



- Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia: artinya segala hukum dan aturan turunan yang berlaku di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila
- Pasal 2, UU no 12 tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara
- Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

## Pancasila Sebagai Dasar Negara Bisa Disebut Sebagai

- Norma tertinggi
- Staatfundamentalnorm
- Norma pertama
- Cita Hukum (Rechtsidee)
- Cita Hukum (Rechtsidee)



Pancasila sebagai sumber hukum material di Indonesia yang harus dituangkan dalam hukum formal negara, yakni UUD 1945 dan peraturan di bawahnya



## // Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika



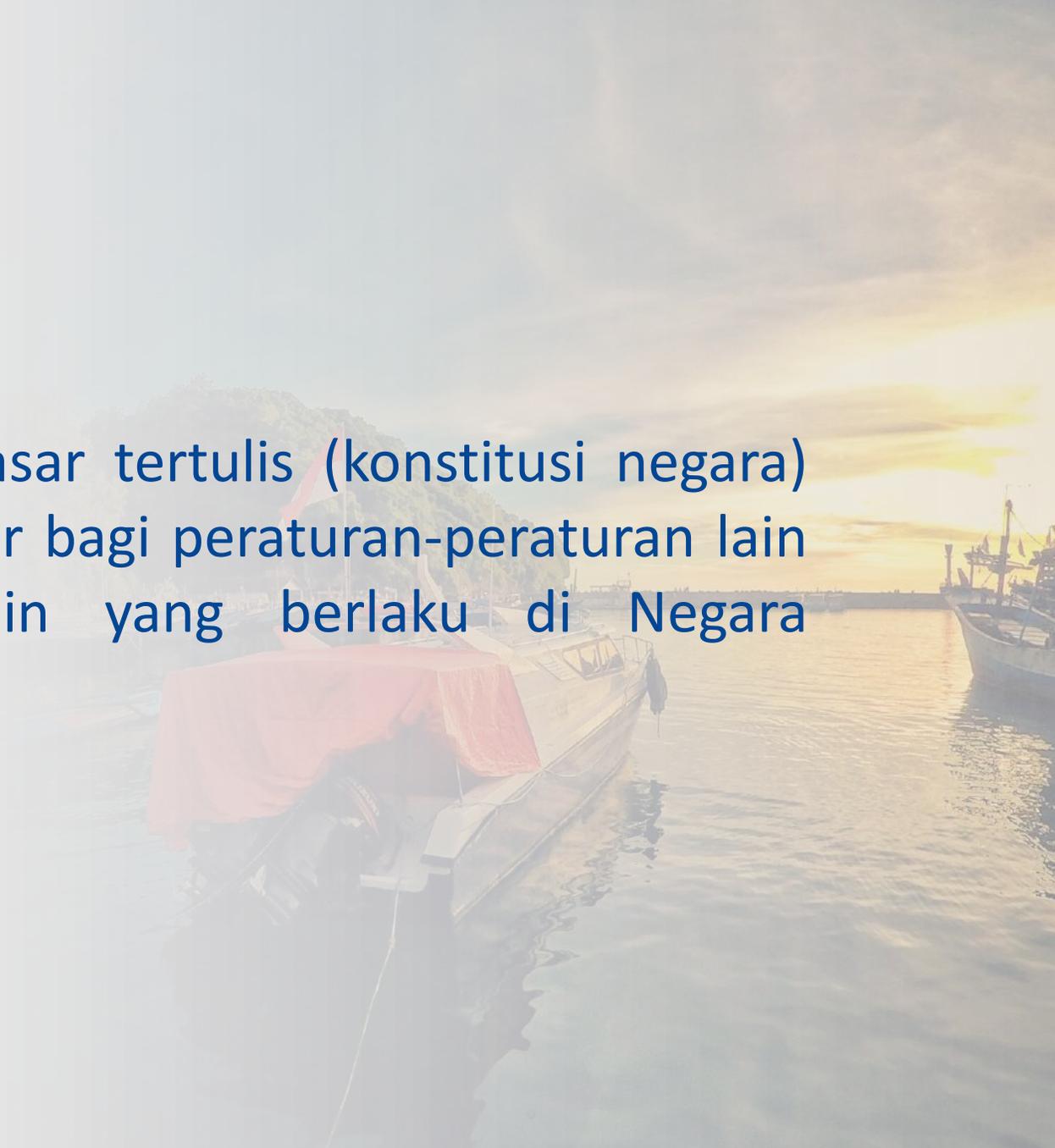
Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan **Identitas Nasional Indonesia** (Kaelan, 2010 :39). Maksudnya bahwa asal nilai (kausa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Konsekuensinya ciri khas sifat, serta karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila.



// Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

# UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

UUD RI 1945 Suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara) yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia



## ISI DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

- Pembukaan dan Pasal-pasal
- Ditetapkan oleh PPKI, tgl. 18 Agustus 1945
- Diundangkan dalam berita RI Tahun II Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946



# KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

## UUDNRI 1945

- UUDNRI 1945 (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949)
- UUD 1949 disebut sebagai KRIS 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
- Disebut sebagai UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
- UUD 1945 (Dekrit Preseiden 5 Juli 1959-sekarang)



# UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 SEBAGAI HUKUM TERTULIS TERTINGGI

- Mempunyai kekuatan mengikat bagi pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, warganegara
- UUD berisikan norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan dasar
- UUD 1945 merupakan hukum tertinggi
- UUD 1945 merupakan sumber hukum dari semua peraturan/perundang-undangan



## FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

### UUDNRI 1945

- Sumber hukum tertinggi bagi produk hukum dan kebijaksanaan pemerintah
- Sarana/alat pengawasan (kontrol) berlakunya semua peraturan-peraturan dalam suatu negara



## HAL-HAL YANG DIMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Tujuan  
Negara

Bentuk  
Negara

Bentuk  
Pemerintahan

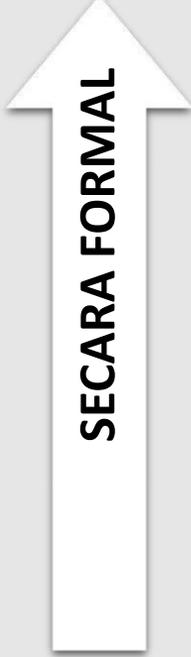
Pembagian  
Kekuasaan Negara

Hak-hak dan  
Kewajiban Warga  
Negara

Pertahanan,  
Keamanan dan  
Politik, Ekonomi,  
Sosial Budaya



## HAL-HAL YANG DIMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945



**SECARA FORMAL**

Dicantumkannya Pancasila secara formal dalam Pembukaan UUD 1945;

Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif;

Perumusan yang menyimpang berarti merubah secara tidak sah.



**SECARA MATERIAL**

Materi yang dibahas BPUPKI secara kronologis adalah Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945;

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

## HUBUNGAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DENGAN PASAL-PASAL

- Suasana kebatinan UUD NRI 1945 dijiwai Pancasila
- Pokok pikiran yang pada UUD 1945 terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945
- Semangat UUD 1945 menyemangati pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya yang merupakan satu kesatuan
- Bersifat kausal dan organis

# NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)



## PENGERTIAN BANGSA

- Menurut antropologi bangsa merupakan pengelompokan manusia yang keterikatannya disebabkan adanya kesamaan fisik, bahasa, dan keyakinan
- Secara politis bangsa merupakan pengelompokan manusia yang keterikatannya disebabkan adanya persamaan nasib dan tujuan
- Benedict Anderson mendefinisikan bangsa sebagai suatu komunitas politik yang dibayangkan yang artinya tidak selalu sesuai dengan kenyataan



## PENGERTIAN NEGARA

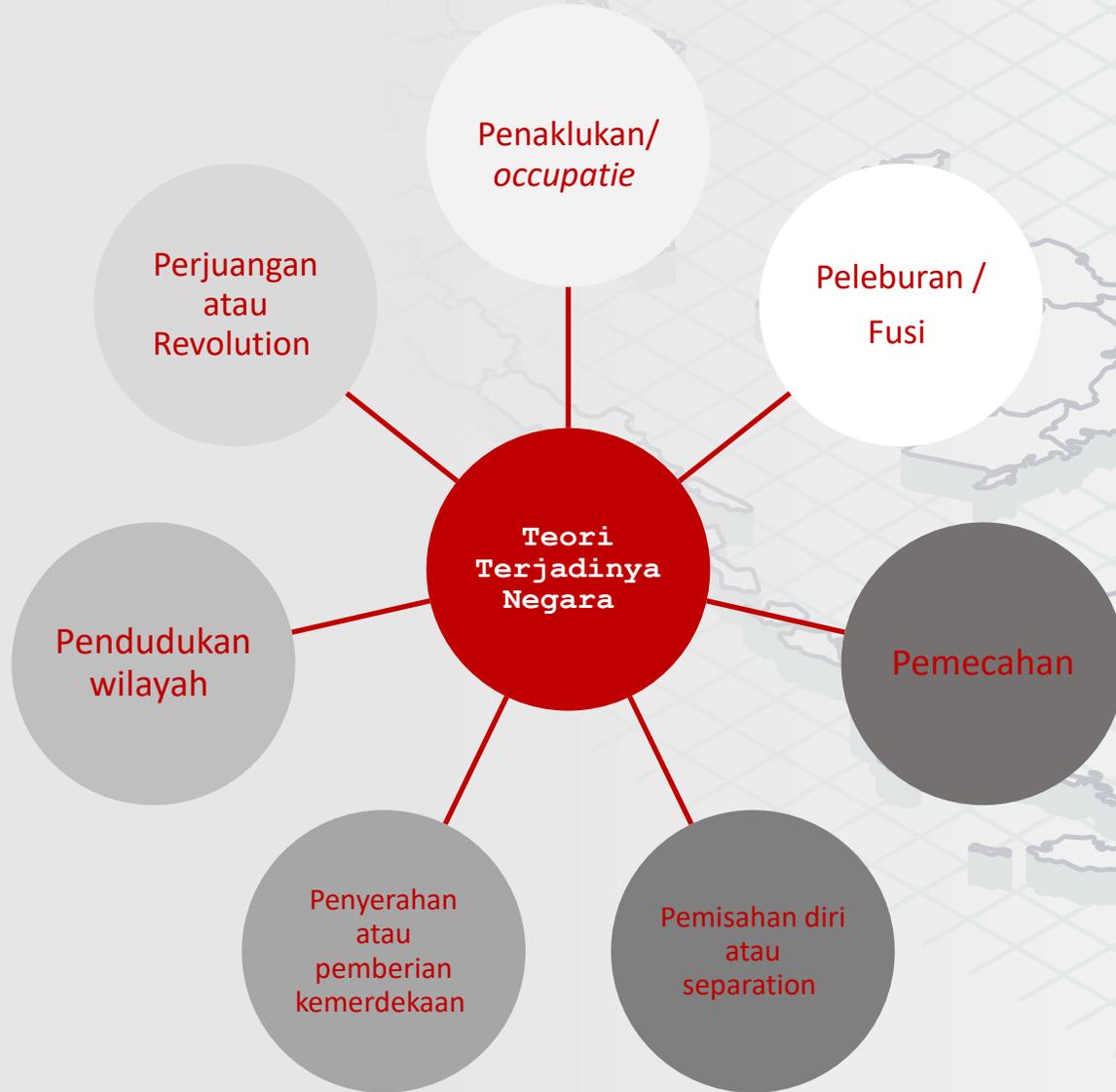
Negara merupakan suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan beberapa kelompok yang mendiami.



## TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

- Teori hukum alam (Plato dan Aristoteles )
- Teori kekuasaan/ kekuatan (Machiaveli )
- Teori ketuhanan/teokrasi (Freidericch Julius Stahl, Thomas Aquinas, dan Agustinus)
- Teori perjanjian (Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu )





// Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika



## Sifat Negara

Memaksa

Monopoli

Mencakup  
Semua



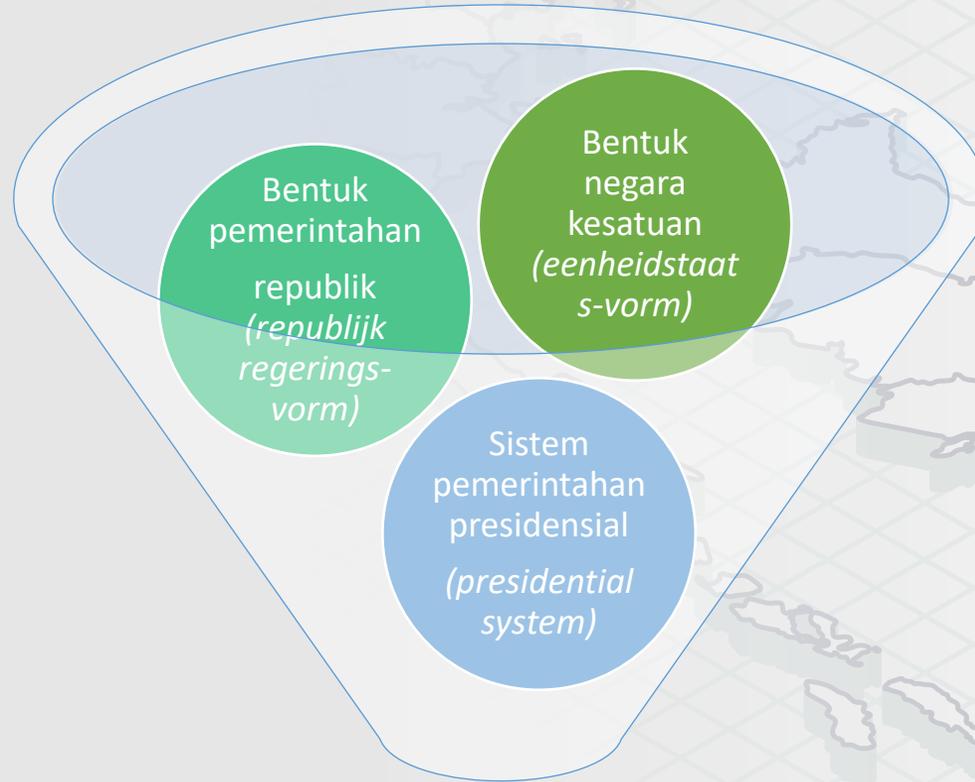
## BENTUK NEGARA



Negara Kesatuan



Negara Serikat  
(Federasi)



**NKRI**

## Ciri-ciri Negara Kesatuan

- Mewujudkan kebulatan tunggal, mewujudkan kesatuan unity, negara tunggal yang monosentris (berpusat satu)
- Hanya mempunyai satu negara serta hanya mempunyai satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatur bagi seluruh daerah negara.
- Hanya ada satu pusat kekuasaan yang memutar seluruh mesin pemerintahan dari pusat sampai ke pelosokpelosok, hingga segala sesuatunya dapat diatur secara sentral, seragam dan senyawa dalam keseluruhannya.
- Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi.



## KESEPAKATAN DASAR BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN UUD NRI 1945

Tidak  
Mengubah  
Pembukaan  
UUD 1945

Tetap  
Mempertahankan  
NKRI

Mempertegas  
system  
pemerintahan  
Presidensial

Mempertegas  
system  
pemerintahan  
Presidensial

Penjelasan  
UUD 1945  
ditiadakan  
serta hal-hal  
normatif  
dalam  
Penjelasan  
dimasukkan ke  
dalam pasal-  
pasal

Perubahan  
dilakukan  
dengan cara  
"adendum"

Dengan demikian jelas bahwa negara kesatuan tetap dipertahankan dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Yang lebih penting dalam pemilihan semua bentuk negara akan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut.

**Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”**



# BHINEKA TUNGGAL IKA

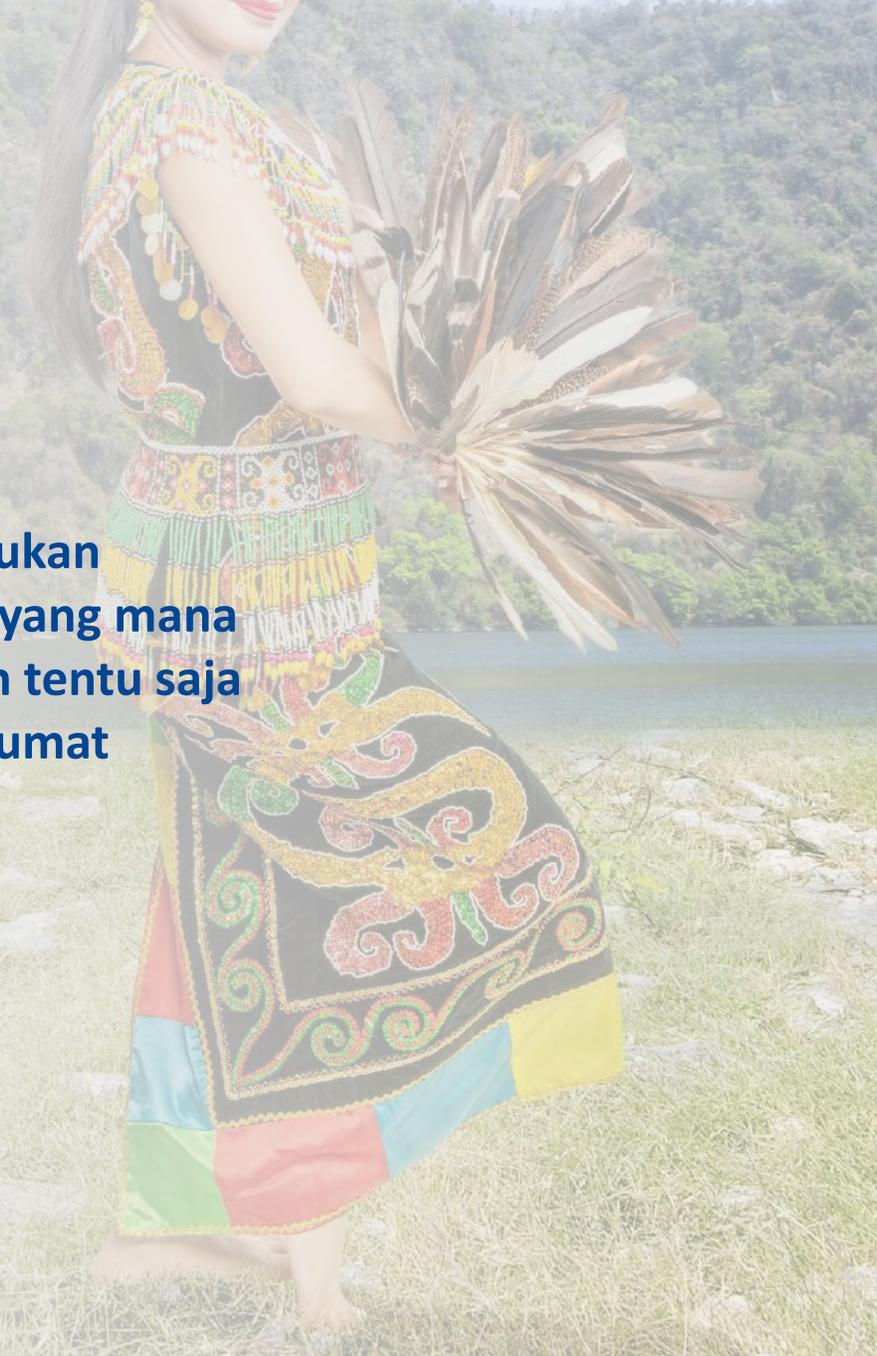
**BHINEKA  
TUNGGAL IKA**

Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular semasa kerajaan Mojopahit sekitar abad 14. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupuh 139



Jadi, makna Bhineka Tunngal Ika adalah,  
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua

**Bhinneka Tunggal Ika** dijadikan sebagai semboyan untuk menyatukan seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia, yang mana diantara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dan tentu saja tidak hanya berkait dengan semangat toleransi kehidupan antar umat beragama.



## Sejarah Bhinneka Tunggal Ika

### Zaman Kerajaan Majapahit

Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit.

### Zaman kemerdekaan

Tokoh yang mengusulkan pertama kali adalah Moh. Yamin kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951

**Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk.**



## Sejarah Bhinneka Tunggal Ika

### Pasal 6A ayat (3)

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah dengan suku, agama, ras, budaya berbeda.

### Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B

Semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah

### Pasal 25A

Penguatan kedaulatan wilayah NKRI

### Pasal 26 Ayat (1)

rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia sehingga sudah melekat hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku

### Pasal 29 Ayat (2)

Menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia

### Pasal 32

Merupakan landasan juridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat

### Pasal 36 A

Menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

## Bhinneka Tunggal Ika dalam era globalisasi

Permasalahan yang dihadapi

Dampak buruk globalisasi yang membawa kebudayaan-kebudayaan baru menjadikan komposisi kebudayaan masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks. Karena banyaknya kebudayaan baru yang datang dan diterima begitu saja menyebabkan terjadinya penyimpangan kebudayaan di masyarakat.

Masalah-masalah klasik seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang sewaktu-waktu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika selamanya akan tetap relevan mengiringi kehidupan bernegara di Indonesia karena komposisi rakyat Indonesia akan terus beragam sampai kapanpun juga. Perkembangan zaman yang cepat dan masuknya budaya baru biarkanlah berlalu karena pada dasarnya kita semua satu kesatuan meskipun berbeda-beda.

Hendaknya perbedaan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan maupun ketimpangan sosial serta kesenjangan ekonomi jangan dijadikan pembatas karena sampai kapanpun Indonesia adalah negara yang multikultural.

Solusi

**Terima Kasih**